BAB I

PENDUHLUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Menurut Arbi Sanit “Pemilu merupakan institusi yang mengejawantahkan demokrasi²”. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Demos*” dan “*kratos*”. *Demos* artinya rakyat, dan *kratos* adalah pemerintahan (*rule*) atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan (*strength*)³. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak⁴, sebagaimana juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

² Arbi Sanit, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, dalam Andy Ramses M, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009), hal. 213

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

rakyat dan untuk rakyat⁵. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna yang luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin yang bersaing⁶. Rakyat dituntut untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya berpartisipasi dalam bidang politik ini.

Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan mempergunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara secara langsung/tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, yang diselenggarakan melalui kampanye politik dalam pemilu. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dari pasangan calon⁷. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kampanye dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, sering terjadi permasalahan⁸. Salah satu

⁵ R. Siti Zuhro, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik* Vol 16 No. 1, 2019, hal. 70.

⁶ Heru Nugroho, Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol No. 1, 2012, hal. 2.

⁷ Syahrizal Adi Gunawan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengikuti Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* 1(1), 2019, hal. 56

⁸ Pasal 267, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu pada saat melaksanakan kegiatan kampanye politik. Sering sekali dalam melaksanakan kegiatan kampanye melibatkan anak-anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2018 terdapat 15 jenis pelanggaran dan 34 kasus penyalahgunaan. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat 248 kasus yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik.⁹ Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye.

Sebagai respons terhadap beragam penyalahgunaan anak dalam kegiatan kampanye pemilu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah lebih awal melakukan serangkaian antisipasi terkait hal tersebut melalui berbagai cara, baik sosialisasi kepada media massa maupun kepada penyelenggara pesta demokrasi yakni KPU dan peserta pemilunya, untuk tidak segan-segan mengeluarkan larangan terkait pelibatan anak dalam politik praktis termasuk menindak tegas bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu bersama mitra strategis perlindungan anak, KPAI juga telah membentuk Gerakan Semesta Perlindungan Anak, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 di KPAI. Salah satu komitmen yang dihasilkan forum ini adalah pendeklarasian penguatan jejaring kemitraan demi menyinergikan strategi perlindungan anak dalam menyoroti beberapa persoalan perlindungan anak diantaranya-Nya pengawasan pelaksanaan kampanye ramah anak.

Perangkat Peraturan Perundang-Undangan, memiliki payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelanggar kampanye yang melibatkan anak-anak. Hal ini dapat kita jumpai di arena kampanye hampir pasti di dalamnya terdapat anak-anak. Melihat kenyataan kejadian seperti itu, mereka para penyelenggara atau orang yang menjadi panitia sebenarnya sudah dapat dijerat hukum, karena yang dapat mendapatkan sanksi adalah perseorangan atau sejumlah orang yang bertindak sebagai penyelenggara. Sayangnya selama ini politisi ataupun elite partai politik selalu cuci tangan, mereka selalu punya alasan sehingga selalu bersih terhindar dari jeratan hukum.

Selama ini kegiatan kampanye pemilu masih dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam berpolitik, karena pemilu sesungguhnya merupakan momentum pendidikan politik rakyat yang baik. Hanya saja dalam faktanya, kampanye hanya menjaring simpatik publik yang sesungguhnya diluar arena konsepsi yang sejati, karena hingga kini belum ada konsepsi yang paling mendekati demokratis selain model pemilu. Sehingga pemilu merupakan pilihan untuk meratakan pesta demokrasi sekaligus memastikan adanya kedaulatan rakyat.

Setelah gendang ditabuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanda dimulainya kampanye terbuka bagi para peserta pemilu, anak sebagai bagian dari komponen bangsa yang sebelumnya ramai dibicarakan sebagai generasi penerus bangsa supaya jangan dilibatkan dalam politik praktis justru sering lenyap perhatiannya dari ingatan publik ketika hingar bingar pesta demokrasi sudah bertebaran dimana-mana sampai seantero nusantara

ini. Anak yang seharusnya dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik justru sering terabaikan dengan berbagai alasan, semua pihak lebih fokus memikirkan bagaimana jalannya pemilu bisa berjalan aman, lancar dan tertib tanpa ada gangguan keamanan maupun kecurangan dalam pelaksanaannya, ketimbang hanya mengurus anak-anak yang ikut dalam kegiatan politik praktis.

Pelanggaran pelibatan anak dalam politik praktis dikarenakan masyarakat kurang tahu, barangkali model sosialisasi hak anak perlu dievaluasi, tetapi jika secara institusi semua Partai Politik sudah mendapatkan peringatan “warning” dari berbagai pihak terutama pemerhati perlindungan anak seperti KPAI, sejatinya bisa dikategorikan sebagai “pembangkangan” dan itu merupakan pelanggaran hak anak berat, karena sangat berbahaya bagi psikologis dan mental anak baik dalam waktu terbatas maupun berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, penyalahgunaan anak dalam kampanye Pemilu melanggar hak anak. Terlebih dalam UU No. 10/2008 pasal 84 ayat 2 huruf j tentang kampanye menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kampanye dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Klausul “warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”⁹ masih bersifat umum. Bisa saja karena alasan tidak terdaftar, seseorang tidak memiliki hak pilih. Namun sejatinya anak-anak khususnya di bawah 17 tahun

⁹ Undang Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

merupakan warga negara yang tidak memiliki hak pilih yang berarti bisa dikategorikan masuk dalam klausul tersebut.

Banyak pertimbangan mengapa anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan politik, diantara-Nya; alasan ketidaksesuaian dengan perkembangan psikologis anak, alasan kenyamanan anak, hingga alasan terampasnya waktu anak untuk mengisi waktu luang secara berkualitas, karena menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 11 disebutkan

Pasal 11

“setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan kreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi kepentingan diri¹⁰”.

Namun demikian, masih ada pihak yang merasa keberatan akan hal tersebut, karena menganggap bahwa pelibatan anak dalam kampanye sebenarnya tidak menjadi masalah. Asumsinya bahwa dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak ada satu pasal pun yang mengatur masalah ini, yang ada adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan dan kemungkinan lain dimana anak dijadikan objek bagi keuntungan orang lain, baik secara seksual, ekonomi maupun kepentingan lainnya. Apalagi pasal 15 UU Perlindungan Anak, ayat (a) berbarengan dengan ketentuan untuk melindungi anak dari pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan maupun melibatkan anak di dalam peperangan. Sehingga konteksnya dianggap bukan dilarangnya terlibat dalam aktivitas politik,

¹⁰ Pasal 11 Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

tetapi dilindungi dari kegiatan yang diduga ada unsur penyalahgunaan, dan kekerasan yang dapat membahayakan proses tumbuh kembang mereka, terlebih kampanye pemilu dianggap bisa dijadikan media belajar bagi anak.

Sebaliknya, melibatkan anak dalam kampanye pemilu dianggap dapat membahayakan tumbuh kembang anak, karena tidak hanya dapat mengancam anak secara fisik dalam kampanye terbuka maupun arak-arakan kendaraan. Secara psikis juga dianggap dapat mengganggu kejiwaan anak yang belum matang dan belum siap menerima persaingan yang keras dalam berpolitik. Oleh karena itu, keberadaan pasal 15 (ayat a) UU Perlindungan Anak sesungguhnya lebih didasari sebagai tindakan preventif untuk melindungi anak.

Berdasarkan kasus yang terjadi belakangan ini, KPAI menemukan pelanggaran hak anak dalam pemilu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut secara jelas terdapat sejumlah pelanggaran hak anak dalam Pemilu 2024, di antaranya menjadikan anak sebagai pengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu melalui rekaman-rekaman video. Rekaman tersebut disebar di media sosial dengan tujuan sebagai kampanye. Pelanggaran lainnya yaitu para tokoh politik mengarahkan anak-anak untuk mengingat dan mempromosikan capres tertentu, tempat pendidikan, termasuk pondok pesantren, dijadikan target kampanye oleh tim kampanye pasangan capres-cawapres. Padahal secara jelas dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye dengan tegas melarang tempat pendidikan dijadikan sebagai

target kampanye.¹¹ Kasus yang sama juga ditemukan di kampanye caleg Purworejo melibatkan anak dibawah umur, dimana caleg di Purworejo divonis 3 bulan BUI karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kampanye pemilu, yang dengan sengaja melibatkan anak-anak pada pemenuhan hak pilih mereka. Kasus ini baru diketahui setelah pihak Bawaslu mendapatkan laporan.¹²

Melihat penyebab mengapa anak bisa berada di tengah-tengah kampanye, sebenarnya bisa dengan mudah diketahui pihak mana yang terlibat. Jika seorang anak tampil di panggung kampanye dengan tujuan sebagai penarik massa, sudah pasti keberadaannya karena dengan sengaja dilibatkan oleh partai politik bersangkutan, sehingga partai politik tersebut sebenarnya dapat dituntut dengan menggunakan pasal 15 (ayat a) tersebut, namun jika keberadaannya bersama dengan orang tuanya, patut diduga bahwa anak tersebut sengaja diajak oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya lah yang bisa dituntut. Dalam permasalahan tersebut kemudian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Keikutsertaan Anak Dalam Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Undang Undang No 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Dan Fiqih Siyasah.”**

B. Rumusan Masalah

¹¹<https://www.antaraneews.com/berita/3951015/kpai-temukan-pelanggaran-hak-anak-dalam-pemilu-2024> diakses tanggal 09 November 2024, pukul 10.00 WIB.

¹²<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7166244/kampanye-libatkan-anak-di-bawah-umur-caleg-di-purworejo-divonis-3-bulan-bui>. diakses tanggal 09 November 2024, pukul 10.40 WIB

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi anak ikut kampanye ?
2. Apa implikasi hukum dari keikutsertaan anak dalam kampanye politik?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam konteks kampanye politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi anak ikut kampanye
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari keikutsertaan anak dalam kampanye politik
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam konteks kampanye politik

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat tentang betapa pentingnya memahami esensi dari anak dalam kaitannya dengan keterlibatan anak dalam kampanye politik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Partai Politik

Penelitian ini dapat dijadikan tinjauan bagi partai politik terkait urgensi dari pelibatan anak dalam kampanye politik di pemilu.

b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi orang tua terkait pentingnya waktu anak untuk bersosialisasi di lingkungan dengan teman sebaya dari pada terlibat dalam kampanye politik.

c. Bagi Bawaslu

Penelitian ini dapat memberikan gambaran Bawaslu secara komprehensif terkait masalah pelibatan anak dalam kampanye politik.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan peneliti selanjutnya sebagai dasar dalam melakukan penelitian yang kaitannya dengan pemilu.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak

hukum itu berada. Penegakan Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah penegakan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam kaitannya dengan keikutsertaan anak dalam kampanye politik.

b. Keikutsertaan Anak dalam Pemilu

Keikutsertaan anak dalam pemilu adalah anak dilibatkan dalam kegiatan politik seperti kampanye, yang mana hal tersebut ialah sesuatu yang dihindari, sebab banyak pertimbangan mengapa anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan politik, diantara-Nya; alasan ketidaksesuaian dengan perkembangan psikologis anak, alasan kenyamanan anak, hingga alasan terampasnya waktu anak untuk mengisi waktu luang secara berkualitas. Dalam konteks penelitian ini, keikutsertaan anak dalam kampanye adalah objek penelitian peneliti sebagai bentuk permasalahan.

c. Hukum

Hukum dalam konteks ini adalah peraturan Perundang – Undangan, yang mana peneliti merujuk pada Undang – Undang 23 Tahun 2008 tentang perlindungan anak, Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang – Undang Dasar 1945.

d. *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah merupakan salah satu ilmu yang secara umum membahas mengenai kepentingan negara serta

secara khusus mencakup mengenai kebijakan, peraturan dan hukum yang telah diciptakan oleh para pemegang jabatan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Fiqih siyasah akan dijadikan tinjauan peneliti dalam menghadapi permasalahan di penelitian ini.

2. Penegasan Operasional

Dalam judul penelitian “Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Keikutsertaan Anak Dalam Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Trenggalek)” peneliti akan meneliti perihal kondisi penegakan dalam masalah keikutsertaan anak dalam kampanye politik kemudian peneliti menggunakan tinjauan hukum dan *Fiqih siyasah* serta teori lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir seperti penjelasan berikut.

BAB I: terdiri atas latar belakang masalah, Permasalahan kajian (Identifikasi pembatasan dan rumusan masalah), tujuan kajian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: memuat tentang kajian teori dan penelitian terdahulu

BAB III: berisi metode penelitian yang memuat antara lain : a.) pola/jenis penelitian, b.) sumber data c.) Teknik dan instrument pengumpulan data, d.) Teknik analisis data, e.) prosedur penelitian.

BAB IV: bab ini penulis menganalisis data yang ada kemudian melakukan justifikasi/ pembenaran, penolakan terhadap teori atau menemukan teori baru.

BAB V: memuat temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ditetapkan pada bab awal.